

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Terbukti pada krisis tahun 1998, dimana banyak perusahaan yang gulung tikar akibat pengaruh krisis global, tetapi UMKM masih tetap dapat bertahan. Mengingat begitu “berartinya” UMKM bagi perekonomian negara Indonesia, maka sudah seharusnya bahwa UMKM di negeri ini dapat terus berkembang dan wajar rasanya jika pemerintah begitu gencarnya berusaha mengembangkan UMKM.

Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam pengembangan UMKM ialah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses dalam menguatkan struktur modal tersebut. Karena banyaknya UMKM yang termasuk dalam kategori *unbankable*.

Menurut Kasmir (2002) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral di Indonesia Berfungsi untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan secara luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara spesifik tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan (Kasmir:2004). Dalam kaitan ini salah satu tugas BI adalah mencari solusi atas kesulitan UMKM dalam mendapatkan tambahan modal usahanya, agar perekonomian dalam negeri

terus ke arah yang lebih baik. Salah satu program BI dalam meningkatkan permodalan UMKM itu ialah melalui *linkage Program*.

Linkage program adalah salah satu cara mendorong intermediasi dengan memberdayakan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Linkage program* merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing BPR/BPRS sekaligus efisiensi pelaksanaan skim kredit Bank Umum (Konvensional dan Syariah). *Linkage program* menjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara Bank Umum dengan BPR/BPRS dalam hal penyaluran kredit kepada UMKM. Tujuannya adalah untuk mempercepat pencapaian *business plan* kredit Bank Umum kepada UMKM, juga untuk mengatasi keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia Bank Umum dalam menjangkau usaha mikro secara langsung di pedesaan. Sementara itu bagi BPR/BPRS, *linkage program* dapat mengatasi hambatan kesulitan modal kerja yang diperlukan dalam penyaluran kredit.

Linkage program Bank Umum dengan BPR sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001. Tetapi waktu itu belum terorganisasi dengan baik secara konsep maupun mekanisme. *Linkage program* ini mulai terorganisasi rapi ketika Bank Indonesia meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Salah satu momentum yang juga kian membangkitkan semangat ber*linkage* antara Bank Umum Dengan BPR adalah keluarnya *generic model linkage program*. Sejak itulah aturan aturan main *linkage* lebih jelas seperti adanya persyaratan minimum BPR peserta *Linkage*. Munculnya tiga model *linkage* yang terdiri dari *executing, chaneling, dan joint financing* serta kode etik peserta *linkage*. Hal ini di

maksudkan agar Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat memperluas akses pembiayaan kepada anggotanya.

Menurut Muhammad (2005) Bank Syariah sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam sangat *concerned* dengan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan sosio-ekonomi, artinya bank syariah tidak boleh menyalurkan dananya pada sektor tertentu saja. Salah satu persoalan yang di hadapi perbankan syariah kini seperti halnya masalah perbankan konvensional yaitu menyalurkan pembiayaan (Hamidi:2003). *Linkage program* diharapkan mampu mengatasi permasalahan di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro dengan baik.

Program ini secara teori dianggap cara yang cukup baik untuk penyelesaian permasalahan yang di hadapi dan menarik untuk di teliti sehingga beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang *Linkage Program*. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maesaroh (2011) di peroleh hasil bahwa *linkage program* belum mempengaruhi tingkat kesehatan kerja LKM secara keseluruhan, sedangkan perbandingan rasio menjelaskan bahwa penerapan *linkage program* belum mengalami pengaruh terhadap peningkatan laba. Penelitian Lain yang di lakukan oleh Kumara (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa keberadaan *linkage program* tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ialah pengungkapan implementasi dan keefektivitasan *linkage program* pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sehingga

peneliti kali ini ingin meneliti terkait manfaat secara obyektif yang di rasakan oleh Bank Syariah Mandiri Malang BPRS Bumi Rinjani.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Outlook Bank Syariah 2013 di peroleh hasil yaitu, Dari 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan pelaksanaan fungsi sosial dan *linkage*, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: (i) dana CSR Rp 42,2 milyar, (ii) dana ZISW Rp 52,7 milyar, (iii) *linkage program* BPRS Rp 207,2 milyar dan (iv) *linkage program* BMT Rp 439,2 milyar. Hal ini dapat terlihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Dana Linkage



Sumber : outlook Bank Syariah 2013

Dari Observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 6 Nopember 2013 di Bank Syariah Mandiri Malang di peroleh data bahwa Bank Mandiri Syariah Malang melakukan Program berdasarkan peraturan pemerintah melalui

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang pedoman umum *linkage program* antara bank umum dan keperasi nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009. Linkage Program itu sendiri ada tiga metode yaitu *Executing, Chanelling, dan Joint Financing*. Akan tetapi yang di gunakan oleh Bank Mandiri Syariah Malang hanya metode *Chaneling dan Executing* dengan prinsip Mudharabah. Manfaat yang di rasa secara umum ialah penyaluran kredit Bank Syariah Mandiri bisa tersalurkan dengan baik.

Dari data awal yang di peroleh wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri mengatakan bahwa Bank Syariah Mandiri sudah menjalin kerjasama Linkage Program dengan lembaga keuangan mikro.(republika.co.id). Kemitraan (*linkage program*) Bank Syariah Mandiri (BSM) per September mencapai sekitar Rp 1 triliun. BSM telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 1000 koperasi dan sejumlah bank pembiayaan rakyat syariah di tanah air.

Kepala Bagian *Strategic Relation* Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro, dan Program BSM, Dien Lukita P, mengatakan :

program kemitraan BSM dengan sejumlah lembaga keuangan lainnya terjalin cukup baik. "Untuk linkage program kita kerja sama dengan sekitar 1000 koperasi, enam BPR dan 40 BPRS yang menjadi nasabah BSM dengan total pembiayaan melalui linkage program per September sekitar Rp 1 triliun. (Republika.co.id)

Selanjutnya kerja sama dengan Permodalan BMT, BSM telah merealisasikan dana sekitar Rp 19 miliar dengan pola *executing*. Untuk tahap selanjutnya pun masih dalam proses. Sektor yang dimasuki untuk *linkage program* pun beragam, mulai dari perdagangan hingga pertanian. melalui *linkage*

program pun tercatat memiliki rasio pembiayaan bermasalah (*non performing finance/NPF*) yang terjaga, yaitu 0,3 persen. (Republika.co.id)

Pada Agustus 2010, aset BSM telah mencapai Rp 27,17 triliun dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) Rp 23,78 triliun dan pembiayaan Rp 21,19 triliun. Dari sisi jaringan BSM telah memiliki 464 outlet, terdiri atas 91 kantor cabang, 208 kantor cabang pembantu, 34 kantor kas, 52 kantor layanan syariah, 52 payment poin, 13 kas keliling, dan 14 gerai online.

BPRS Bumi Rinjani Kepanjen yang merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan UMKM. Yang mempunyai anak cabang diberbagai pelosok desa yaitu di Gondanglegi, Bululwang, Turen, Pakis, Lawang dan Singosari sehingga mampu menjangkau UMKM yang *unbankable*. BPRS Bumi Rinjani ini merupakan salah satu BPRS penerima dana *linkage program* dari Bank Syariah Mandiri Malang selama tiga tahun sejak tahun 2010. Dalam hal pelaksanaan BPRS Bumi Rinjani Kepanjen juga mengikuti metode yang di gunakan oleh Bank Mandiri Syariah Malang, dimana manfaat yang di rasakan oleh BPRS Bumi Rinjani dengan adanya program ini ialah adanya penambahan modal kerja sehingga penyaluran kredit kepada pihak ketiga juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ingin meneliti bagaimana implementasi *linkage program* di Lapangan serta manfaat secara khusus pada masing masing lembaga keuangan. Maka Penelitian kali ini berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN *LINGKAGE PROGRAM* BANK SYARIAH MANDIRI MALANG KEPADA BPRS BUMI RINJANI KEPANJEN.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kembangkan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan linkage program Bank Syariah Mandiri Malang kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen?
2. Bagaimana manfaat Linkage Program terhadap BPRS Bumi Rinjani Kepanjen?
3. Bagaimana manfaat Linkage Program terhadap Bank Syariah Mandiri Malang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan linkage program Bank Syariah Mandiri Malang kepada BPRS Bumi Rinjani Kepanjen?
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat Linkage Program terhadap BPRS Bumi Rinjani Kepanjen?
3. Untuk mengetahui bagaimana manfaat Linkage Program terhadap Bank Syariah Mandiri Malang?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis dapat menambah khazanah pengetahuan dan literatur guna pengembangan ilmu Ekonomi Islam, yang salah satunya tentang linkage Program.
2. Manfaat bagi bank syariah untuk mengetahui Pelaksanaan Linkage Program yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam manajemen perbankan syariah dalam upaya meningkatkan produktifitas.
3. Manfaat bagi masyarakat memberikan masukan dan informasi tentang linkage program serta dapat menjadi referensi atau literatur penelitian lebih lanjut dengan judul atau tema yang sejenis.

